

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Letak Geografis**

Kecamatan Ngetos adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Nganjuk, kecamatan Ngetos memiliki sembilan desa, yaitu Desa Klodan, Blongko, Kepel, Kweden, Ngetos, Suru, Oro-Oro ombo, Mojoduwur, dan Kuncir. Kecamatan Ngetos termasuk dalam daerah yang terbelah pelosok karena jarak tempuh dari kecamatan Ngetos ke kota yang lumayan jauh dengan memerlukan waktu kurang lebih 30 menit.

Sebagian besar lahannya dipenuhi dengan persawahan dan perkebunan, meskipun di daerah persawahan dan perkebunan tingkat perekonomiannya cukup stabil dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di kecamatan Ngetos. Kebanyakan ekonomi yang dihasilkan di kecamatan Ngetos ini dari hasil pertanian yang berupa padi, jagung, lalu dalam perkebunan ada buah jeruk, rambutan, mangga dan lain sebagainya. Dimana dalam penanamannya itu sedesa atau sekecamatan harus sama dengan permusimanya. Apabila musim kemarau masyarakat serentak

menanam jagung dan apabila musim penghujan masyarakat menanam padi, begitu juga perkebunan ada musim tersendiri pada waktu panennya.<sup>1</sup>

Kecamatan Ngetos ini terletak di sebelah kecamatan sawahan, kecamatan Ngetos merupakan kecamatan yang termasuk daerah pegunungan yang terletak paling selatan pada kabupaten Nganjuk. Letak desa-desa yang ada dikecamatan Ngetos terbilang sangat banyak dan luas, jalan desa menuju kecamatan Ngetos juga tidak begitu jauh semua dapat dijangkau dengan mudah. Walaupun kecamatan Ngetos jauh dari akses menuju ke kota namun akses jalan sudah sangat mudah. Meskipun jalannya yang naik turun akan tetapi jalan sudah halus.

Kemudian ada satu jalan dari kota Nganjuk untuk menuju ke kecamatan Ngetos melewati kecamatan berbek ke selatan lalu memasuki kecamatan Ngetos. Akan tetapi jika dari daerah desa-desa yang ada dikecamatan Ngetos akses jalannya juga sangat banyak. Pada dasarnya meskipun kecamatan Ngetos ini terletak di daerah persawahan dan pegunungan namun tak kalah cepat perkembangannya dengan desa-desa yang lain.

Banyak pendidikan-pendidikan yang berdiri, UMKM yang berkembang dan banyak usaha-usaha kecil hingga besar yang berdiri, khususnya lembaga Badan Usaha Milik Desa ini yang sekarang berkembang

---

<sup>1</sup> Observasi pada tanggal 17 september 2020

pesat sehingga keberadaannya sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

Di kabupaten Nganjuk ada sebuah lembaga yang bernama Badan Usaha Milik Desa Bersama, di kecamatan Ngetos bernama Badan Usaha Milik Desa Bersama Sejahtera Mandiri, di mana Badan Usaha ini bergerak dibidang simpan pinjam karena banyak para kelompok petani maupun pelaku usaha di desa yang meminjam modal untuk mendirikan usaha maupun kegiatan sosial lainnya.

Lembaga ini berada di kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk, beralamatkan di desa Ngetos kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk. Desa Ngetos ini sudah termasuk daerah pegunungan akan tetapi jalan menuju desa ini sangat mudah karena sudah banyak penduduk dan akses jalan yang dipakai untuk menuju ke desa-desa lainnya.

Jarak tempuh sendiri dari pusat kabupaten Nganjuk sekitar 30 menit atau 16 km, sedangkan dari pusat provinsi sekitar 80 km. Jalan aksesnya pun juga sangat mudah untuk dilewati karena sepanjang jalan sudah teraspal secara merata ke desa-desa. Akan tetapi ada juga kecamatan lain yang jalannya masih berlubang.<sup>2</sup>

## 2. Sejarah Lembaga

Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk sudah berdiri sejak tahun 2006 akan tetapi nama lembaganya masih PPK,

---

<sup>2</sup> Observasi pada tanggal 20 September 2020

lalu pada tahun 2007 sampai 2014 menjadi PNPM Mandiri, lanjut pada tahun 2016 lembaganya menjadi BKAD, dan mulai tahun 2017 sampai sekarang dinamakan Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Nama lembaga selalu berubah ubah karena awal mula dana dari dan PNPM menggunakannya untuk usaha simpan pinjam, setelah itu pada tahun ke tahun perkembangan pendapatannya selalu meningkat.

Awal mula lokasi lembaga atau kantornya berada di desa kunci kecamatan Ngetos dan itu masih menyewa tanah masyarakat pada tahun 2006-2016, lalu selanjutnya pada tahun 2017 lembaga sudah mempunyai kantor milik sendiri di desa Ngetos kecamatan Ngetos dan kepemilikan sudah atas nama Bumdesma sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk.<sup>3</sup>

Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk ini diketuai oleh Bapak Untung Kridanto sejak tahun 20016 awal mula berdiri sampai sekarang, yang mengelola atau melaksanakan kegiatan Bumdesma itu sendiri ada 4 karyawan yaitu sebagai ketua, sekretaris, kasir dan staf sedangkan diluar itu juga ada yang mengkoordinasikan kegiatan lembaga yang telah dipilih melalui musyawarah antar desa yaitu pihak BKAD. Namun di luar kantor banyak juga pihak-pihak lain yang juga mengelola dan melaksanakan kegiatan baik pihak dari desa maupun pihak dari dalam lembaga itu sendiri.

---

<sup>3</sup> Obsevasi pada Tanggal 22 September 2020

Untuk mengembangkan dan membersarkan usaha ini membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mencapai target yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Melewati kendala dan ujian yang sangat besar akan tetapi semangat para team pengelola sekarang membuahkan hasil sehingga sekarang lembaga Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos akabupaten Nganjuk sudah dikenal dikalangan Masyarakat.

Lembaga ini bergerak di bidang simpan pinjam yang dimaksudkan sebagai upaya menampung kegiatan perekonomian yang berbasis pemberdayaan yang berasal dari pemerintah. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekkonomi antardeasa, mengoptimalkan aset antar desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa dan kelurahan, meningkatkan rencana kerja sama usaha anatar desa atau dengan pihak ketiga.

Lembaga ini memiliki beberapa program yaitu program kredit usaha mandiri dan kredit usaha perempuan atau kelompok lembaga ini memiliki nasabah yang terdiri dari 9 desa yang ada dikecamatan Ngetos yaitu desa Ngetos, Klodan, Suru, Oro-Oro Ombo, Kuncir, Mojoduwur, Klodan, Blongko, dan kepel.<sup>4</sup>

Nasabah meminjam uang untuk mengembangkan usaha dan merintis usaha baik usaha rumahan maupun usaha secara mandiri pada umumnya

---

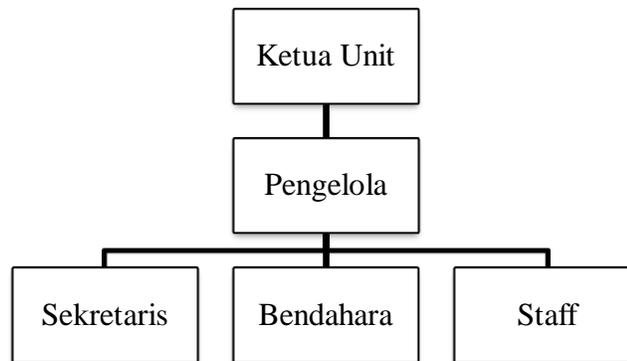
<sup>4</sup> Buku laporan Pertanggungjawaban tahunan Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk, Buku ditdak diterbitkan, hal 12.

usaha diperdagangan dan pengolahan. Hasil pertanian nasabah di Bumdesma sudah mencapai kurang lebih 250 untuk yang simpan pinjam kelompok dan yang kredit mandiri kurang lebh mencapai 100 nasabah. Kantor Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos kabupaten Nganjuk ini buka hari senin- jum'at yaitu mulai pukul 08.00 hingga pukul 14.00.

### 3. Struktur Organisasi

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi**



Setiap kepengurusan Bumdesma Sejahtera Mandiri yang telah digambarkan dalam bagan tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda. Berikut ini adalah data atau tugas-tugas setiap pengurus terkait dengan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.<sup>5</sup>

**Tabel 4.1**

**TuPokSi**

No	Nama	Jabatan	Tugas
----	------	---------	-------

<sup>5</sup> Buku laporan Pertanggungjawaban tahunan Bumdesma sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk, hal 4.

1	Untung Kridanto	Ketua Unit	Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdesma) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART Bumdesma, mengembangkan dan menyusun rencana kerja dan rencana akhir anggaran tahunan bersama pemerintah desa.
2	Darmanto	Sekretaris	Mengelola data dan informasi Bumdesma sebagai basis perencanaan, melaksanakan kegiatan teknis kemitraan dan kerjasama dengan lembaga desa dan pihak ketiga lainnya, menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan, menyusun laporan pertanggungjawaban setiap tahun
3	Titik Winarni	Bendahara	Mengelola administrasi dan keuangan sebagai basis perencanaan, mengelola aset dan perbendaharaan Bumdesma, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan setiap akhir tahun.
4	Ika Ning Rahayu	Staf	Pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen, bertanggungjawab terhadap manajer Unit serta membantu dalam melayani konsumen, pengecekan.

## 2. Legalitas Usaha

Badan Usaha Milik Desa Bersama Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk memiliki izin legalitas usaha yang termuat dalam akta Pendirian nomor: 29 Tertanggal 19-05-2016 (Sembilan Belas Mei Dua Ribu Enam Belas) yang dibuat oleh dan dihadapan DINI DWI TJAHYANINGRUM Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Nganjuk yang mana telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibawah nomor: AHU-

0058089.AH.01.07.Tahun 2016 tertanggal 23-05-2016 (Dua Puluh Tiga Mei Dua Ribu Enambelas).<sup>6</sup>

3. Unit Usaha yang beroperasi Bumdesma Sejahtera mandiri
  - a. Simpan pinjam perempuan

Simpan pinjam perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan dengan kegiatan pengelolaan dana tau pinjaman yang memang diperuntukkan untuk perempuan serta diiringi dengan pemberdayaan melalui usaha-usaha yang dimilikinya atau usaha yang akan dirintisnya. Adapun yang menjadi tujuan umum program simpan pinjam di pedesaan adalah kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja. Dengan adanya simpan pinjam diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui permodalan yang diberikan agar dapat mengembangkan usahanya atau memulai usaha guna mengurangi angka kemiskinan.

- b. Simpan pinjam usaha mandiri

---

<sup>6</sup> Buku laporan pertanggungjawaban tahunan Bumdesma sejahtera mandiri kecamatan Ngetos Nganjuk, hal 2.

Simpan pinjam mandiri yaitu permodalan yang diberikan kepada perseorangan untuk dijadikan modal usaha perseorangan yang tujuannya dapat membantu mengembangkan usaha mandiri yang telah dijalankan.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Pada Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk**

Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang berisi tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan sangat penting dan harus disusun oleh setiap lembaga baik untuk lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan, termasuk Bumdesma Sejahtera Mandiri kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Laporan keuangan dapat dikatakan akuntabel yaitu apabila sudah menerapkan syarat prinsip akuntabilitas, prinsip akuntabilitas yang pertama yaitu berisi tentang integritas keuangan, Pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **a. Integritas Keuangan**

Pada penerapan prinsip akuntabilitas harus disertai dengan integritas keuangan yaitu berarti seorang pegawai harus jujur dan tidak memihak dalam pembuatan laporan keuangan. pihak yang membuat laporan keuangan harus memiliki integritas yang tinggi terhadap fakta atau keadaan yang ada lalu laporan keuangan harus dibuat dengan apa

adanya sehingga laporan keuangan dapat untuk dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Untung Kridanto selaku Ketua Unit Lembaga. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan :

“untuk penerapan prinsip akuntabilitas di Bumdesma Sejahtera mandiri sudah berjalan dengan baik, dengan cara menerapkan kejujuran dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan pengeluaran maupun pemasukan keuangan yang ada di Bumdesma Sejahtera Mandiri”<sup>7</sup>

Sama halnya yang dipaparkan oleh Bapak Darmanto selaku sekretaris di Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk beliau menjelaskan tentang integritas keuangan yang ada di Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara meningkatkan integritas keuangan yaitu dengan cara menerapkan kejujuran dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan kenyataan yang ada, khususnya bagi pihak pembuat laporan keuangan. dalam wawancaranya beliau menjelaskan sebagai berikut :

“di sini saya akan menambahi saja, ya tentu saja dalam membuat laporan keuangan pada setiap pihak pembuat harus memiliki sifat jujur dan menerapkan aturan yang sudah berlaku, akan tetapi semua pegawai dan staf disini saya rasa sudah menerapkan sikap yang menunjukkan prinsip akuntabilitas yang inetgritas keuangan”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak untung Kridanto pada hari Selasa 22 September 2020

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Untung Kridanto pada hari rabu 23 September 2020

Hal ini ditekankan oleh Ibu Titik Winarni selaku Bendahara di Bumdesma Sejahtera mandiri kecamatan Ngetos Nganjuk, bahwa penjelasannya yaitu sebagai berikut :

“Penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan di Bumdesma Sejahtera Mandiri sudah diterapkan dengan baik, bahkan sebelum lembaga ini maju seperti sekarang ini sudah membuat laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan operasional dan juga tentang laporan keuangan karena semua yang kita lakukan dilembaga harus dipertanggungjawabkan dihadapan pemerintah maupun di masyarakat, laporan keuangan yang disusun yaitu laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan dan pada setiap akhir periode di adakan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diikuti oleh pengelola Bumdesma Sejahtera Mandiri, pengawas, anggota dan Pihak yang terkait”<sup>9</sup>

Dari paparan diatas, selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota Bumdesma Sejahtera mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk untuk mengecek keabsahan informasi, berikut wawancara yang dijelaskan oleh Ibu Jaenab selaku anggota Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngeto Nganjuk:

“laporan keuangan yang disusun oleh lembaga Bumdesma sudah baik serta sudah menganut prinsip integritas keuangan karena pada setiap akhir periode laporan keuangan diseminarkan secara publik yang diikuti oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga itu sudah dapat dikatakan dengan menerapkan sikap jujur dan menyusun laporan keuangan secara apa adanya dari setiap kegiatan maupun transaksi yang telah dilaksanakan”<sup>10</sup>

b. Pengungkapan (disclosure)

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu titik Winarni pada hari Kamis 24 Setember 2020

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Jaenab pada Hari Sabtu 26 September 2020

Pengungkapan laporan keuangan merupakan penyampaian informasi tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan. pengungkapan yang dilakukan perusahaan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam laporan keuangan antara lain, pos laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis (*terminologi*), penjelasan dalam kurung, lampiran, komunikasi manajemen dalam bentuk surat atau pernyataan resmi. Hal ini sesuai wawancara yang dilakukan dengan Bapak Untung Kridanto, yaitu sebagai berikut :

“Untuk laporan keuangan yang dapat dikatakan akuntabel yaitu laporan itu dapat diungkap kan atau disampaikan secara publik di Bumdesma sejahtera mandiri laporan keuangan sendiri dapat di sampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan, di Bumdesma Sejahtera Mandiri pada setiap akhir periode diadakan pada setiap akhir periode dalam acara Musyawarah Antar Desa (MAD) laporan keuangan dipresentasikan atau disampaikan dihadapan pemerintah, pengawas, dan anggota lalu pihak-pihak lain yang bersangkutan”<sup>11</sup>

Selanjutnya wawancara dari Bapak darmanto selaku sekertaris yang menjelaskan tentang pengungkapan yaitu sebagai berikut :

“pengungkapan laporan keuangan di Bumdesma Sejahtera Mandiri sudah sangat terbuka karena laporan pertanggungjawaban

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Untung Kridanto pada hari Senin 27 September 2020

sangat terbuka untuk umum maksudnya disini siapa saja yang ingin mengetahui laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun laporan keuangan dipersilahkan untuk melihat dan membaca buku laporan pertanggungjawaban tersebut”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Ibu Lilik Winarni selaku berdahara, berikut penjelasannya mengenai pengungkapan laporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

“ya tentu saja laporan keuangan di sini sudah sesuai standart peraturan yang ditentukan sehingga laporan dapat disampaikan di aparat pemerintahan, kita membuat laporan sesuai dengan kegiatan, pemasukan dan pengeluaran yang ada, bahkan pada setiap akhir periode atau akhir tahun laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh auditor, untuk auditor sendiri yang menentukan adalah dari dinas PMD”

c. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan adalah cara seseorang menaati peraturan untuk membuat laporan keuangan yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan, karena laporan keuangan pada setiap lembaga menganut aturannya masing-masing yang sudah ditentukan oleh standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan dan kegiatan operasional diatur dalam UU no 4 tahun 2015 sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Untung Kridanto selaku ketua Unit Bumdesma Sejahtera mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk.

“penerapan pertanggungjawaban bukan hanya dilihat dari integritas keuangan dan pengungkapan akan tetapi juga dari segi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pembentukan Bumdes ini merupakan amanat dari UU No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran Bumdes dan

peraturan menteri (Permen) Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Noor 6 Tahun pada pasal 87 yang menyatakan bahwa Bumdes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan, dan kegotongroyoangan untuk mendayagunakan seala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu adalah isi dari UU PermenDesa”

Selanjutnya, Bapak Darmanto selaku sekretaris menjelaskan tentang ketaatan Bumdesma Sejahtera Mandiri Kec Ngetos Nganjuk menjelaskan bahwa Bumdesma sudah menganut peraturan Undang-Undang Bumdes, penjelasannya sebagai berikut :

“Di Bumdesma sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan kini yang semakin komprehensif mengatur tentang Bumdes dan perkembangan jumlah Bumdes di Indonesia pun tergolong pesat, dalam laporan pertanggungjawaban Bumdes terdiri dari 5 BAB. BAB 1 Pendahuluan, BAB II laporan umum, BAB III arah kebijakan yang telah ditempuh, BAB IV pelaksanaan program kerja dan keuangan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban yang merasa sulit untuk dipenuhi oleh beberapa Bumdes. Temuan tersebut berdasarkan laporan audit keuangan Bumdes oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersma Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD)”

Selanjutnya Ibu Lilik Winarni selaku Bendahara juuga menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang dianut oleh bumdes beserta isinya, penjelasannya yaitu sebagai berikut :

“sebenarnya yang mengatur secara rinci tentang bumdes yaitu berdasarkan UU no 4 tahun 2015 pasal 3, yaitu yang berisi meningkatkan perekonomian desa yaitu artinya keberadaan Bumdes dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di desa, isi yang kedua yaitu meningkatkan usaha masyarakat yaitu yang berarti kita kan dari Bumdes sendiri memberikan jtawaran

pinjaman untuk masyarakat lalu pinjaman tersebut diperuntukkan untuk modal usaha, untuk isi yang ke 3 yaitu mengembangkan rencana kerja yaitu artinya rencana kerja di lembaga maupun di desa harus lebih berkembang, yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa”

Dibawah ini terdapat lampiran laporan pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan (CALK) pada unit SPP/ UEP dan Unit Kredit Usah Mandiri yang berjalan di Bumdesma Sejahtera Mandiri pada tahun 2018 dan 2019 :

**Tabel 4.2**

**Unit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi produktif (UEP)**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>
2018	Pendapatan Operasional SPP	867.400.000.00
2019	Pendapatan Operasional UEP	859.000.000.00

Sumber : data diolah oleh peneliti

**2. Kendala dan solusi yang terjadi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan pada Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk**

Kendala merupakan rintangan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap lembaga. Karena suatu lembaga berjalan, maka berbagai kendala itu pasti akan datang, baik itu kendala internal maupun eksternal.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Bumdesma Sejahtera Mandiri dalam penerapan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut :

a. Kendala

1) Keterbatasan (Sumber daya Manusia) SDM

Di Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk kekurangan tenaga kerja dan terkadang SDM terbatas tenaganya untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban secara sempurna. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Untung Kridanto selaku Ketua Unit Bumdesma Sejahtera Mandiri, penjelasannya yaitu sebagai berikut :

“memang di sini kemampuan SDM sangat terbatas dilihat dari wawasan tentang pentingnya penerapan prinsip pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh setiap karyawan dan staf juga yang paling utama yaitu penyusunan laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi dilihat dari hasilnya sudah memenuhi syarat dari ketentuan yang berlaku bisa di bilang hampir 90% sesuai”

Bapak Darmanto selaku sekretaris Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk menyatakan hal yang sama, dalam wawancaranya beliau menjelaskan yaitu sebagai berikut :

“memang kendala utama yaitu keterbatasan SDM, maka dari itu pihak dari Unit Bumdesma harus banyak-banyak memperelajari lebih dalam mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas agar semakin kedepan laporan keuangan lebih baik lagi”

Selanjutnya Ibu Titik Winarni menyatakan hal yang sama dalam wawancaranya beliau menjelaskan sebagai berikut ;

“jujur ya mbak, sebenarnya kita dari staf juga kurang memahami tentang penerapan prinsip akuntabilitas akan tetapi kami dituntut untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Permendesa jadi kita aselalu belajar untuk menjadi yang terbaik agar laporan keuangan sesuai, jadi alhamdulillah kita selalu mengikuti perkembangan meskipun sulit kami selalu mengikuti sehingga untuk menerapkan penerapan prinsip akuntabilitas ini kita tidak begitu susah dalam menjalaninya”

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa wawancara yang disampaikan yang dipaparkan di atas menyatakan bahwa Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk masih keterbatasan mengenai SDM nya.

b. Solusi

1) Mengadakan pelatihan/seminar

Menurut bapak Untung Kridanto untuk mengatasi solusi dari keterbatasan SDM di Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk adalah dengan diadakannya seminar atau pelatihan mengenai SDM khususnya untuk membuat laporan yang sesuai dengan penerapan prinsip pertanggungjawaban yang berlaku. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa:

“jadi kita seharusnya mengadakan pelatihan/seminar kepada karyawan dan Staf di Bumdesma ini, agar para staf ataupun pihak yang bersangkutan disini selalu update dan menambah

ilmu tentang akuntabilitas dan skill yang mahir dalam pembuatan laporan keuangan sesuai standart yang berlaku”

Selanjutnya Bapak darmanto menjelaskan solusi dari kendala yang terjadi dalam penerapan prinsip akuntabilitas.

Dalam wawancaranya yaitu sebagai berikut:

“ ya kita sendiri harus sering-sering baca dan mengikut pembaruan yang ada karena penerapan akuntabilitas itukan penting bukan hanya dari laporan keuangannya saja yang dipertanggungjawabkan tetapi juga dari kegiatan maupun perilaku staf dan karyawan semua dipertanggungjawabkan kepada atasan yang paling utama pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha esa”

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Titik Winarni selaku bendahara di Bumdesma Sejahtera mandiri Kecamatan Ngetos Nganjuk. Dalam wawancaranya beliau menjelaskan sebagai berikut:

“ya tentunya kita sebagai karyawan dan staff disini ya harus pintar-pintar untuk melatih diri dan menanamkan ke diri sendiri bahwa penerapan prinsip akuntabilitas itu penting untuk kita sendiri dan khususnya untuk memperbaiki kualitas dari lembaga ini”

Dari wawancara yang telah dipaparkan di atas bahwa solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengadakan pelatihan/seminar karyawan maupun staff mengenai SDM dan juga khususnya berisi seputar penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan.

### **3. Usaha Bumdes Mensosialisasikan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Terhadap Masyarakat**

Di Bumdesma Sejahtera Mandiri Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk melakukan usaha mensosialisasikan penerapan prinsip akuntabilitas terhadap laporan keuangan, usaha ini cukup banyak, baik berupa event maupun program atau usaha yang dilakukan secara berkala atau berkelanjutan, untuk wawancara ini ada dua pihak yaitu pihak Bumdesma Sejahtera Mandiri sebagai pelaksana dan Pihak Masyarakat atau Nasabah sebagai *controlling*. Berikut pengungkapan dari bapak Untung Kridanto dalam wawancara yaitu sebagai berikut :

“usaha yang kita lakukan untuk mensosialisasikan prinsip pertanggungjawaban ke masyarakat yaitu dengan menyampaikan/mempresentasikan laporan pertanggungjawaban ke pihak-pihak yang bersangkutan dan peserta (masyarakat), dari kegiatan tersebut maka masyarakat khususnya Nasabah Bumdesma Sejahtera Mandiri dapat mengetahui laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh Bumdesma tersebut”

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak darmanto, yaitu sebagai berikut :

“selain dari musyawarah kita juga menyediakan papan informasi biasanya yang tertulis yaitu tentang laporan pertanggungjawaban program atau kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan pada setiap akhir periode, untuk melihat laporan keuangan akan tetapi laporan itu diperuntukkan untuk pengunjung yang khususnya menjadi anggota maupun nasabah Bumdesma Sejahtera Mandiri”

Dari wawancara di atas disimpulkan oleh bapak darmanto selaku

Sekretaris yaitu penjelasannya sebagai berikut :

“Usaha yang dilakukan Bumdes yaitu mengadakan Musyawarah antara desa (MAD) evaluasi dan pertanggungjawaban kelembagaan, kegiatan

perlindungan yang dihadiri oleh wakil/utusan desa, BKAD, Badan Pengawas, Tim Verifikasi, Pengurus kelompok KPMD, Anggota serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan. Untuk materi yang dibahas yaitu laporan pertanggungjawaban Bumdesma dan rencana kerja Bumdesma, Laporan BKAD, pembahasan rencana penggunaan Dana sosial, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelestarian. Jadi usaha untuk mensosialisasikan penerapan prinsip akuntabilitas yaitu dengan mengundang para masyarakat khususnya nasabah untuk mengikuti Musyawarah maupun kunjungan ke kantor.”

Wawancara di atas adalah wawancara dari pihak Bumdesma Sejahtera Mandiri, lalu di bawah ini peneliti cantumkan wawancara dari anggota Bumdesma yaitu Ibu Sutami selaku anggota (tokoh Masyarakat) dari Bumdesma sejahtera Mandiri (sebagai *controlling*), dengan pertanyaan: Apakah nasabah/anggota Bumdesma mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dalam laporan keuangan?

“ya saya mengetahui dengan adanya penerapan prinsip akuntabilitas yang ada di Bumdesma Sejahtera Mandiri, dari awal saya bergabung di sini dari segi program, laporan maupun aktivitas di beritahukan secara public dan terbuka kepada pihak masyarakat khususnya nasabah”

Kemudian ditekankan oleh ibu Jaenab selaku nasabah/ anggota dari Bumdesma sejahtera Mandiri, yaitu sebagai berikut :

“Disini saya ingin menambahkan saja, bahwa bukan mengetahui saja memang di Bumdesma ini jika kita ingin mengajukan pinjaman maka dijelaskan terlebih dahulu prosedur, kegiatan, dan pertanggungjawabannya dijelaskan atau diberitahukan pada waktu musyawarah jadi laporan kegiatan dan laporan keuangan di presentasikan secara terbuka, contohnya ketika ada masyarakat yang datang boleh melihat bu ku pertanggungjawaban yang ada di ruang yang telah diseddiakan dan juga papan informasi yang sudah jelas”